

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ginting *et al.* (2020) dengan judul “*Sinergitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Dana desa di Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal Jawa Tengah*” memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas kelembagaan desa dalam mengelola dana desa sehingga penelitian terfokus pada kelembagaan lokal Desa Jungsemi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal dalam mengelola dana desa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif fenomenologis dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diperoleh melalui informan perangkat desa, pengelola dana desa, masyarakat, pendamping desa, serta dokumentasi pendukung, kemudian data tersebut dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa sinergitas dapat diketahui melalui beberapa aspek yakni: (1) Aspek keterlibatan lembaga lokal desa dalam menyediakan informasi yang akurat mengenai kebutuhan, prioritas, dan kemampuan masyarakat; (2) Aspek kepatuhan aturan dalam hal kedisiplinan dan ketertiban waktu; (3) Aspek perencanaan pembangunan desa untuk mengelola dana desa melalui mekanisme pembangunan partisipatif; (4) Aspek partisipasi masyarakat yakni melibatkan

beragam kalangan masyarakat; (5) Aspek penetapan prioritas penggunaan dana desa mulai dari pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa; dan (6) Aspek kreativitas masyarakat dengan menyempurnakan formulasi dan memaksimalkan pemanfaatan dana desa. Sinergitas yang terjadi antar lembaga dapat dikatakan baik sehubungan dengan pelibatan berbagai lembaga desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan kepatuhan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan.

Febrianti *et al.* (2019) melakukan penelitian dengan judul “*Sinergitas Pemerintah Desa dan Kelembagaan Lokal Subak dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia (Studi Kasus: Subak Jatiluwih, Kabupaten Lokal Subak)*”. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sinergitas pemerintah desa dengan kelembagaan lokal subak dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan di wilayah perdesaan dengan basis Subak sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD). Fokus dari penelitian ini adalah memahami sinergi yang terjadi antara pemerintah desa dan lembaga subak lokal dalam pembangunan berkelanjutan melalui peninjauan aspek komunikasi dan koordinasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dari sumber data kepustakaan, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data dianalisis secara bersamaan dengan metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil yang didapat berupa dari segi komunikasi dapat diketahui bahwa 3 lembaga yang masing-masing memiliki kedudukan setara yakni pemerintah desa adat, pemerintah desa, dinas, dan lembaga lokal saling menerapkan komunikasi internal dan eksternal dalam

mengatur pembangunan. Sementara itu, aspek koordinasi terbagi lagi ke dalam 4 sub-indikator yang diteliti yakni: (1) hubungan langsung untuk membahas perencanaan hingga evaluasi; (2) kontinuitas dengan pertemuan atau rapat rutin; (3) penetapan tujuan yang ingin dicapai dengan jelas; serta (4) efektivitas komunikasi untuk menyampaikan permasalahan atau kendala yang ditemui.

Penelitian yang dilakukan oleh Berliandaldo *et al.* (2021) berjudul "*Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata di Kebun Raya Cibinong*". Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dan menaksir besar dampak yang diakibatkan dari penerapan kolaborasi dan sinergitas antar *stakeholder*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yang bersifat induktif mengacu pada fakta yang ditemukan di lapangan. Beberapa fokus utama dari penelitian ini adalah: (1) Melakukan identifikasi para *stakeholder* yang ikut serta dalam pengembangan pariwisata; (2) Menyusun analisis peran dari tiap *stakeholder*; (3) Menganalisis bentuk keikutsertaan dari para *stakeholder*; dan (4) Mengamati dampak dari kegiatan kolaborasi dan sinergitas antar *stakeholder*. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa ditemukannya dua kelompok *stakeholder* yakni *Stakeholder Primer* yang terdiri atas LIPI dan Pemerintah Kabupaten Bogor, sedangkan *Stakeholder Sekunder* yang terdiri atas Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kab. Bogor, Mitra Pengelola Kebun Raya dan Pelaksana TJSL Kab. Bogor. Peran tiap *stakeholder* dibedakan ke dalam empat kategori agar dapat mempercepat proses pembangunan dan pengembangan Kebun

Raya Cibinong yakni Kategori Subjek, Pemain Kunci, Pengikut Lain, dan Pendukung. Kegiatan pembangunan di Kebun Raya Cibinong dapat dirasakan dampaknya pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Penelitian kali ini berjudul “Sinergisme Lembaga dalam Pengembangan Desa Wisata Lerep”. Hal yang membedakan dari penelitian terdahulu adalah penelitian mengambil lokasi di Desa Wisata Lerep yang telah mendapat pengakuan sebagai Desa Wisata Mandiri serta pengelolaannya dijalankan oleh masyarakat sekitar melalui lembaga-lembaga yang saling bersinergi menjalankan peranannya masing-masing. Lembaga yang diteliti lebih variatif mulai dari Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Tani (Poktan), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Paguyuban-paguyuban yang ada seperti Paguyuban Sopir Lerep, Paguyuban Pemilik Homestay, dan lainnya dari 4 dusun yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep. Cakupan pembahasan dalam penelitian ini berupa peran dan sinergisme lembaga dari aspek unsur-unsur komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta dampaknya terhadap pengembangan Desa Wisata Lerep. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Analisis dan uji keabsahan data menggunakan metode yang sama yakni Miles Huberman yang terdiri dari tiga tahap yakni reduksi data, penyajian, dan penarikan simpulan, sedangkan uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber dan metode.

2.2. Peran dan Aktor Kepentingan

Aktor dikatakan menjalankan perannya apabila tersebut melakukan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan kepadanya. Seseorang yang menjalankan hak serta kewajiban yang diembannya sesuai dengan kedudukan atau status, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah mengemban sebuah peranan (Haryanti dan Nugroho, 2018). Banyaknya aktor yang ditemui dalam suatu sektor memiliki peran utama yang berbeda. Model multiaktor dapat mengetahui peran utama yang dijalankan oleh para aktor sehubungan dengan kapasitasnya mempengaruhi faktor-faktor penting dalam sebuah sistem (Ariyani *et al.*, 2020).

Aktor atau pihak yang memegang peran penting dalam suatu lingkup dapat dikelompokkan berdasarkan sumberdaya yang dimilikinya dalam mempengaruhi dan menjalankan tugasnya. Menurut Garrett (1999) dalam Rees & MacDonell (2017), aktor merupakan perorangan, kelompok, atau institusi yang mengemban peran penting dalam satu sektor, dan perlu identifikasi mengenai kelebihan, kekurangan, dan sikap dalam mendukung atau menentang suatu persoalan. Setiap aktor dapat dilihat bagaimana bentuk hubungan terhadap aktor lain, sikap aktor, dan perkiraan adanya kerja sama atau hubungan sesuai tujuan masing-masing aktor. Karakteristik aktor yang berkaitan dengan hubungan antar aktor, sikap aktor, hingga adanya konflik dan aliansi yang mungkin muncul dalam upaya pengembangan destinasi wisata perlu dilakukan analisis (Ariyani *et al.*, 2020).

2.3. Sinergisme

Sinergisme atau kerja sama untuk memperoleh dampak yang baik bagi seluruh pihak yang terlibat dapat dicapai dengan komunikasi dan koordinasi yang baik pula. Sinergi merupakan kegiatan gabungan atau perpaduan beberapa unsur untuk memperoleh hasil yang lebih baik, sinergisme dibangun melalui komunikasi dan koordinasi (Dwinugraha, 2017). Tidak semua kerja sama antar dua pihak atau lebih dapat dikatakan sebagai kolaborasi karena dalam kolaborasi terdapat komitmen dan tujuan terstruktur yang ingin dicapai bersama. Sinergisme merupakan kolaborasi, tetapi tidak semua kolaborasi dapat dikatakan sebagai sinergisme karena hanya kolaborasi atas dua komponen atau lebih yang terikat komitmen dan terstruktur sehingga menghasilkan dampak yang lebih baik dan berbeda dapat digolongkan ke dalam sinergisme (Najiyati *et al.*, 2015).

2.3.1. Komunikasi

Sinergisme dapat tercipta dengan adanya komunikasi baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Komunikasi sendiri merupakan kegiatan interaksi antara dua pihak atau lebih untuk menyampaikan informasi berupa pesan, ide, maupun gagasan yang bertujuan memberi pengetahuan (Nurhayanto *et al.*, 2020). Komunikasi dalam sebuah organisasi atau lembaga terjadi tidak hanya dalam satu lingkup lembaga atau hanya antar ketua dan lembaga anggota, melainkan juga antar pihak di luar lembaga tersebut. Komunikasi secara internal dibutuhkan untuk memberikan

pemahaman terhadap anggota serta bersama mewujudkan visi-misi organisasi, sedangkan komunikasi eksternal penting untuk memberikan pemahaman terkait kebutuhan dan keinginan dari internal organisasi kepada sesama organisasi lain, pemangku kepentingan, pelaku usaha dan industri, hingga masyarakat sekitar (Amin, 2020). Bentuk komunikasi tidak hanya dilakukan antara dua individu, tetapi bisa terjadi dalam sebuah kelompok atau ditujukan kepada khayalak umum. Komunikasi memiliki tiga bentuk: (1) komunikasi pribadi yang terjadi dalam dua macam yakni komunikasi intrapersonal dalam diri sendiri dan juga komunikasi interpersonal yakni komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara serempak; (2) komunikasi kelompok yang terjadi antara tiga atau lebih individu yang berinteraksi secara tatap muka dengan maksud dan tujuan yang diinginkan bersama sehingga semua anggota berkesempatan untuk menumbuhkan karakteristik pribadi para anggota; (3) komunikasi massa yakni menyampaikan informasi yang bersifat umum, serempak, dan seragam dengan memanfaatkan saluran-saluran media massa seperti radio, televisi, dan lainnya (Silviani, 2020).

Komunikasi terjadi melalui sebuah proses yang panjang mulai dari pesan atau informasi yang dikirim dari komunikator hingga diterima dengan baik oleh komunikan yang disusul dengan munculnya respon atau dampak. Argiris (1994) dalam Nurrohim & Anatan (2009) menyatakan bahwa unsur-unsur yang ditemukan dalam proses komunikasi berupa seseorang atau kelompok pengirim informasi, pesan yang ingin disampaikan, saluran sebagai wadah pengirim pesan, gangguan saat berkomunikasi, kondisi saat terjadinya komunikasi, pihak penerima informasi, dan

umpan balik yang diberikan setelah menerima informasi. Komunikasi dalam organisasi dapat menemui tantangan dalam aspek menerima dan memberikan informasi dari satu bagian ke bagian lainnya. Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan komunikasi dalam suatu organisasi adalah cara menyampaikan informasi ke seluruh bagian organisasi serta cara menerima informasi dari seluruh bagian organisasi karena komunikasi memiliki kaitan dengan keseluruhan proses pembudayaan perilaku manusia dalam organisasi (Mingkid dan Harilama, 2018).

2.3.2. Koordinasi

Koordinasi dalam sinergisme berperan penting karena dalam organisasi yang kompleks tentunya sangat bergantung satu sama lain. Koordinasi adalah hal yang penting dalam setiap organisasi dengan tingkat kompleksitas tinggi dan memiliki ketergantungan satu sama lain karena beragam kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang (Nurhayanto *et al.*, 2020). Intensi dari adanya koordinasi organisasi atau lembaga tidak hanya sebatas mencapai visi lembaga melainkan juga untuk menyatukan dan menyelaraskan seluruh bagian dan aktivitas yang dijalankan bagian-bagian dari lembaga tersebut. Koordinasi mempunyai tujuan lain berupa penyatuan tindakan, penyelarasan aktivitas organisasi dan tiap usaha untuk mencapai tujuan bersama (Darmansyah dan Amin, 2019).

Kerja sama, integrasi, dan penyelarasan unsur-unsur lembaga termasuk dalam kegiatan koordinasi. Menurut Syafarudin (1993) dalam Nurhayanto *et al.* (2020)

koordinasi mencakup kerja sama, integrasi, dan sinkronisasi dengan adanya keselarasan unsur-unsur yang terlibat dan komunikasi yang terorganisir dengan memahami hukum yang berlaku untuk mengatur pelaksanaan koordinasi. Koordinasi dapat terwujud dengan baik jika memenuhi beberapa syarat. Menurut Moekijat (1994) dalam Rahmawati *et al.* (2014) terdapat sembilan syarat untuk menciptakan koordinasi yang efektif di antaranya: (1) hubungan secara langsung; (2) koordinasi dimulai sejak awal kegiatan perencanaan; (3) proses yang berkelanjutan pada seluruh waktu; (4) dinamis menyesuaikan perubahan kondisi internal dan eksternal; (5) penetapan tujuan yang jelas; (6) struktur organisasi yang sederhana; (7) penetapan wewenang dan tanggung jawab yang jelas; (8) komunikasi yang efektif; serta (9) kepemimpinan yang efektif.

2.4. Lembaga

Lembaga adalah sebuah organisasi atau perkumpulan orang-orang yang mengerjakan aktivitas bersama untuk mencapai tujuan. Lembaga diartikan sebagai badan atau organisasi yang menjalankan kegiatan usaha (KBBI, 2021). Lembaga dijalankan sesuai aturan main yang berlaku atau biasa disebut kelembagaan. Kelembagaan sebagai aturan main bagi kelompok atau organisasi masyarakat dalam menjalankan proses koordinasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan dengan baik (Arumsari *et al.*, 2017).

Kelembagaan berasal dari kata lembaga yang diartikan sebagai aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi untuk membantu masyarakat berinteraksi dan mencapai tujuan bersama (Ishak dan Hasan, 2020). Aspek penting dalam kelembagaan berupa aspek kelembagaan dan aspek keorganisasian. Kelembagaan memiliki dua aspek penting yaitu “aspek kelembagaan” yang meliputi perilaku sosial dengan inti kajian pada nilai, norma, kepercayaan, dan lainnya serta “aspek keorganisasian” yang meliputi struktur sosial dengan inti kajian pada aspek peran (Prafitri dan Damayanti, 2016).

Kelembagaan lokal dan area aktivitasnya dibagi ke dalam tiga kategori yakni kategori sektor publik (administrasi lokal dan pemerintah lokal), kategori sektor sukarela (organisasi keanggotaan dan koperasi), serta kategori organisasi swasta (organisasi jasa dan bisnis swasta) (Ishak dan Hasan, 2020). Lembaga yang ada di desa wisata memiliki peran penting dalam pengelolaan desa wisata. Lembaga-lembaga yang terdapat di desa wisata merupakan kelompok-kelompok organisasi dengan tugas berupa mengurus kegiatan pariwisata di desa wisata (Yoga, 2017). Lembaga di suatu desa wisata memegang peran penting. Keberadaan suatu lembaga di desa wisata sangat diperlukan karena merupakan wadah untuk menampung, mempromosikan, mengatur, serta mengelola seluruh kegiatan dan kepentingan yang ada (Utomo dan Satriawan, 2017).

Menurut Triambodo & Damanik (2015) dalam Prafitri & Damayanti, (2016) keberadaan kelembagaan dalam bidang pariwisata penting karena peranannya dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat untuk meningkatkan potensi pariwisata,

serta sebagai penggerak dalam memfasilitasi dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam bidang pariwisata. Lembaga di desa juga menjadi penghubung antara pihak-pihak yang berkepentingan. Keberhasilan proses pengembangan sebuah desa wisata tidak bisa terlepas dari adanya kontribusi dari sebuah lembaga atau institusi lokal yang mengelola desa wisata dan menjadi perpanjangan tangan dari berbagai *stakeholder* yang terhubung secara langsung atau tidak (Putra, 2013). Lembaga atau organisasi yang ada di desa wisata bertugas untuk memobilisasi ide-ide dari masyarakat untuk pengembangan desa wisata. Organisasi di desa wisata memiliki kapasitas untuk menghimpun ide atau masukan dari masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan pertemuan atau rapat desa, ide tersebut dimulai sejak perencanaan, pengelolaan, hingga pengaturan yang berhubungan dengan pengembangan desa wisata (Andriyani *et al.*, 2017).

2.4.1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat desa. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat desa yang bertugas membantu kerja dari Kepala Desa dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa terbagi atas tiga bagian. Perangkat desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, yang

jumlahnya disesuaikan berdasarkan kebutuhan serta kondisi sosial budaya desa tersebut (Sajangbati, 2015). Pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa ini bertugas untuk mengelola aset publik di desa. Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi pemerintah modern yang berperan penting dalam pengelolaan barang atau aset publik dan dalam hal ini mencakup melakukan pungutan pajak pada masyarakat lokal (Mondong, 2013).

Pemerintah Desa memiliki wewenang besar dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta menggali sumber daya yang ada untuk membiayai kebutuhan yang ada di desa. Kebijakan Otonomi Desa memberikan wewenang kepada Pemerintah Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau berkehendak bebas sesuai aspirasi masyarakat yang dibatasi oleh kepentingan besar dari Pemerintah Daerah, serta mandiri dalam membiayai pembangunan di desanya tanpa bergantung dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (Nadir, 2013). Penggunaan APBDesa dapat menjadi tolak ukur kinerja dari pemerintah desa. Kinerja dan kemampuan suatu pemerintah desa dapat terlihat dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah serta pelaksanaan pembangunan di wilayah desa (Sulina *et al.*, 2017).

2.4.2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pemerintah memberikan kewenangan langsung kepada pemerintah desa dalam upaya pembangunan desa, salah satunya melalui keberadaan lembaga keuangan di desa yakni Badan Usaha Milik Desa (Pradesyah dan Albara, 2018). BUMDes merupakan lembaga yang ada di desa dan berperan penting dalam mengelola unit usaha atau potensi milik desa yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi serta sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya berkaitan dengan bidang usaha (Ramadana, 2013). Pemerintah desa dan masyarakat telah terlibat sejak awal pendirian BUMDes hingga pada sistem pengelolaannya. Dasar pembentukan BUMDes sebagai penggerak pembangunan di desa adalah adanya prakarsa pemerintah dan masyarakat desa yang merujuk pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat di desa (Ihsan dan Setiyono, 2018).

Badan Usaha Milik Desa memberikan harapan bagi masyarakat di desa agar terjadinya perbaikan kondisi ekonomi. BUMDes tidak hanya mengelola keuangan desa, tapi juga aset milik desa lainnya. Keberadaan BUMDes menjadi harapan bagi masyarakat desa agar ekonomi desa dapat meningkat melalui pengelolaan keuangan desa yang berdasar pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga kawasan pedesaan dapat mengurangi ketergantungan terhadap kota (Chikmawati, 2019). Contoh unit usaha yang dikembangkan dan dikelola oleh

BUMDes sebagai atraksi wisata di desa adalah atraksi alam dan budaya. Peran BUMDes Gerbang Lentera di Desa Wisata Lerep mengelola unit usaha untuk dijadikan atraksi wisata seperti atraksi alam, tari-tarian, dan sebagainya (Sari, 2020).

2.4.3. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Kelompok Sadar Wisata adalah kelompok yang dibentuk untuk mengembangkan pariwisata yang ada di daerahnya. Pokdarwis adalah kelompok swadaya dan swakarsa yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata daerah, menyukseskan pembangunan pariwisata melalui bermitra dengan pemerintah agar kesadaran masyarakat, kualitas sumberdaya manusia, dan mutu produk dan wisata meningkat serta mendorong terlaksananya Sapta Pesona (Resdiana dan Hasanah, 2020). Unsur-unsur dalam Sapta Pesona menjadi pedoman terutama para penggiat pariwisata dan pemangku kebijakan terkait dalam menjalankan kegiatan pariwisata. Sapta Pesona merupakan tujuh unsur yang terdiri atas Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesejukan, Keindahan, Keramahan, dan Kenangan yang terdapat dalam produk wisata sebagai patokan perbaikan kualitas dalam produk wisata sehingga timbulnya peningkatan kesadaran, rasa tanggung jawab dari masyarakat dan pemangku kepentingan agar dapat menerapkan unsur-unsur tersebut pada keseharian (Kementerian Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, 1989). Pokdarwis beranggotakan masyarakat pelaku industri pariwisata di suatu wilayah. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah lembaga yang anggotanya terdiri atas para pelaku kegiatan pariwisata yang peduli dan

bertanggungjawab serta berperan sebagai penggerak untuk menciptakan iklim kepariwisataan di wilayah desa yang kondusif bagi perkembangan kepariwisataan di wilayah desa mereka (Sudarmayasa *et al.*, 2020).

Pokdarwis tidak hanya menyadarkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pariwisata, tetapi juga memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas program yang ditawarkan bagi para wisatawan saat berkunjung. Peran Pokdarwis adalah merencanakan, melakukan implementasi, serta mengelola seluruh program peningkatan kualitas dan kuantitas program-program atraksi wisata yang disuguhkan kepada para wisatawan (Putra, 2013). Pokdarwis mengembangkan pariwisata dengan cara memberikan pembinaan bagi masyarakat tentang pariwisata. Kegiatan pengembangan pariwisata nusantara yang dilakukan oleh Pokdarwis berupa pembinaan masyarakat melalui kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan pariwisata (Purwanti, 2019). Beberapa cara dilakukan dalam rangka mengedukasi masyarakat di kawasan wisata mengenai program Sadar Wisata. Program Sadar Wisata dilaksanakan agar masyarakat dapat menyambut wisatawan dengan baik sehingga terciptanya iklim pariwisata yang kondusif yang dilakukan secara informatif, persuasif, dan edukatif melalui ceramah, serasehan, diskusi, kompetisi, percontohan, dan perintisan (Menbudpar, 2008).

2.4.4. Kelompok Wanita Tani (KWT)

Kelompok Wanita Tani merupakan kumpulan dari ibu-ibu istri para petani atau para wanita yang beraktivitas di bidang pertanian. Biasanya kelompok wanita tani berisikan istri-istri dari petani dan dibentuk untuk melibatkan kaum perempuan secara langsung dalam peningkatan hasil pertanian, seperti menjadi bagian dari motivator dalam mengadopsi dan memperkenalkan teknologi pertanian (Patadungan, 2019). KWT fokus pada pemanfaatan hasil pertanian dan lahan yang ada. Kelompok wanita tani merupakan kumpulan ibu-ibu yang bergerak untuk memajukan pertanian khususnya mengolah hasil pertanian yang berpotensi di daerah tersebut (Nugraeni dan Susilawati, 2020).

Pembinaan KWT diarahkan untuk membuat usaha produktif skala rumah tangga. Kelompok wanita tani (KWT) merupakan salah satu wadah bagi petani dimana para anggotanya terdiri atas para wanita yang bergerak dalam kegiatan pertanian, dan dalam pembinaannya KWT diarahkan untuk membuat suatu usaha produktif pada skala rumah tangga yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian atau perikanan (Evedi dan Suryadharma, 2020). Tujuan dari dibentuknya KWT tidak hanya untuk membuat para anggotanya menjadi lebih produktif, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan. Perkembangan Kelompok Wanita Tani didasari atas keakraban, keserasian, dan kesamaan kepentingan dalam bekerja sama memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan anggotanya (Arisandi, 2020).

2.4.5. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Gabungan kelompok tani yang mewadahi beberapa kelompok tani menjadi lembaga yang dapat mempermudah para petani untuk memperoleh akses pengetahuan dalam memperbaiki cara bertani hingga akses peralatan dan kebutuhan lainnya yang menunjang kegiatan bertani. Gabungan kelompok tani atau disingkat Gapoktan berperan dalam menyediakan wadah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para petani yang tergabung dalam kelompok tani, serta membantu dalam memberikan modal dan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit, dan perlengkapan lainnya yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para petani (Faujiah dan Suhandi, 2020). Para petani di suatu wilayah dapat berkumpul dalam suatu lembaga yang disebut Kelompok Tani (Poktan). Kelompok tani merupakan kumpulan orang-orang yang berprofesi sebagai petani untuk mengatur secara langsung kegiatan usahatani (Nuryanti, 2011). Kelompok tani diharapkan dapat menjadi wadah bagi para petani untuk membuat rencana kegiatan untuk berkolaborasi dalam menjalankan usahatani. Kelompok tani dibentuk dengan harapan dapat menjadi wadah bagi para petani untuk saling bertemu dan bermusyawarah bersama untuk merencanakan kegiatan (Anindita, 2019).

2.4.6. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebuah lembaga yang menaungi para masyarakat khususnya perempuan untuk memberdayakan melalui dikembangkannya pengetahuan serta keterampilan para anggota. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ialah sebuah organisasi yang mempunyai susunan anggota terdiri atas para kaum perempuan mulai dari yang bekerja sebagai ibu rumah tangga hingga pekerja, dan organisasi ini menjalankan beragam kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan serta keterampilan sehingga dapat berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga (Latifah, 2018). PKK dalam masyarakat berperan selaku agen pemberdayaan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang masih belum sejahtera di lingkungan sekitar (Alvianta *et al.*, 2021). Tiga kelompok program kerja yang dijalankan PKK adalah: (1) Program Pokok atau disebut 10 Program Pokok PKK untuk memenuhi kebutuhan dasar dan perwujudan kesejahteraan keluarga; (2) Program Prioritas dalam jangka waktu 5 tahun sebagai penjabaran Program Pokok; dan (3) Program Kerja Tahunan yang merupakan program prioritas tahunan (Aslichati, 2011).

2.4.7. Karang Taruna

Karang Taruna adalah sebuah organisasi bagi para pemuda untuk menampung aspirasi dan mengembangkan potensi diri mereka. Karang Taruna merupakan organisasi di bidang kesejahteraan sosial yang menjadi wadah untuk menampung ide

atau masukan, mengembangkan rasa nasionalisme dan potensi diri, serta melibatkan kaum pemuda dalam kegiatannya (Kawalod *et al.*, 2015). Sumber daya alam dan manusia di suatu wilayah dapat dikembangkan melalui peran serta lembaga Karang Taruna. Karang Taruna berperan dalam pembinaan dan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan produktivitas ekonomi serta mendayagunakan potensi sumber daya alam dan manusia (Ashary, 2016).

2.4.8. Paguyuban

Masyarakat berkumpul bersama dalam suatu paguyuban. Paguyuban atau *gemeinschaft* diketahui sebagai bentuk-bentuk perkumpulan sosial dalam masyarakat pedesaan (Gunawan *et al.*, 2015). Beragam jenis paguyuban bisa ditemukan di desa wisata karena keberadaannya untuk mewadahi kegiatan masyarakat dalam menjalankan perannya di desa wisata. Paguyuban beroperasi dalam satu jenis usaha masyarakat untuk mewadahi kegiatan sehari-hari yang berupa paguyuban masyarakat petani, peternak, dan pariwisata, dengan paguyuban pariwisata meliputi usaha wisata kuliner, penginapan, hingga kreasi buah tangan (Rimawati, 2015). Perkumpulan masyarakat atau paguyuban terbentuk karena adanya kesamaan jasa yang ditawarkan oleh masyarakat dalam pariwisata desa atau kesamaan hobi, seperti contohnya paguyuban *homestay* yakni perkumpulan masyarakat penyedia jasa *homestay*. Jasa pelayanan merupakan potensi ekonomi yang dapat berupa pembentukan paguyuban

dalam menyediakan jasa angkutan dan *homestay* oleh masyarakat setempat (Mujanah *et al.*, 2016).

2.4.9. Kampung Keluarga Berkualitas

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) merupakan kawasan desa atau kelurahan yang aktivitasnya telah terhubung dalam memberdayakan dan menguatkan institusi keluarga sehingga menciptakan dari segi sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat berkualitas. Kampung KB adalah sebuah wilayah setara desa yang terdapat integrasi dan konvergensi dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan peneguhan institusi keluarga pada seluruh dimensi agar dapat menghasilkan peningkatan kualitas dari sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat (BKKBN, 2022). Pemilihan Kampung Keluarga Berkualitas dilihat dari beberapa aspek di antaranya kriteria utama yakni rendahnya keikutsertaan dalam Program KB dan Pra Keluarga Sejahtera, keadaan wilayah yang terbilang miskin, terpencil, kumuh, dan berada di area perbatasan, dan kriteria lintas sektor yang dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat serta kurang memadainya infrastruktur. Kriteria Kampung KB terbagi ke dalam tiga (3) kriteria besar di antaranya kondisi wilayah, pendidikan masyarakat usia sekolah rendah, tingkat partisipasi Program KB, dan lainnya. Kampung KB dicanangkan di desa atau kelurahan yang telah termasuk dalam Kriteria Utama, Kriteria Wilayah, Kriteria Khusus yang terbagi lagi menjadi lima (5) kriteria yakni Kriteria Data, Pendidikan, Program KB, Program

Pembangunan Keluarga, dan Program Pembangunan Sektor Terkait (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2017).

2.5. Desa Wisata

Desa dengan keunikan dapat berpotensi untuk dikembangkan dikembangkan menjadi desa wisata. Setiap desa memiliki keunikan yang berbeda berdasarkan kondisi topografinya, sehingga melalui potensi yang dimiliki dapat berkembang menjadi desa wisata (Sumiasih, 2018). Keunikan yang dimiliki oleh desa wisata tersebut dapat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung. Desa wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki kekhasan dan daya tarik sebagai tujuan wisata (Alfiah *et al.*, 2019).

Desa wisata memiliki dua komponen utama untuk mewadahi interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal berupa akomodasi dan atraksi. Terdapat dua komponen utama dalam desa wisata, yaitu: (1) akomodasi adalah sebagian dari tempat tinggal para penduduk desa dan/atau unit-unit yang dikembangkan dengan konsep tempat tinggal penduduk dan (2) atraksi adalah seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat dengan *setting* fisik lokasi desa agar wisatawan dapat berpartisipasi aktif (Utomo dan Satriawan, 2017). *Homestay* sebagai akomodasi agar wisatawan dapat lebih memahami dan merasakan pengalaman membaur bersama dengan masyarakat desa. Pelaksanaan desa wisata seringkali memungkinkan para wisatawan (*guest*) tinggal di dalam atau berdekatan dengan suasana tradisional untuk

belajar mengenai kehidupan desa dan lingkungan setempat dari masyarakat (*host*) sehingga para tamu dapat memberikan penghargaan (*rewarding*) terhadap nilai-nilai lokal (Susyanti dan Latianingsih, 2014).

2.6. Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata sebagai kesatuan dalam membangun desa secara berkelanjutan, terutama di sektor pariwisata. Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020, pengembangan desa wisata merupakan rangkaian aktivitas pemberdayaan serta pembangunan desa untuk memajukan desa wisata. Pengembangan desa wisata bertujuan untuk mengatraksi wisatawan serta membangun desa yang berkelanjutan di bidang pariwisata (Susanawati *et al.*, 2019).

Perkembangan suatu desa wisata bisa terwujud apabila didukung oleh masyarakat yang ada di desa tersebut. Desa wisata mampu berkembang sesuai dengan tingkat penerimaan seperti dukungan dan keterlibatan masyarakat lokal sebagai tuan rumah dan pelaku utama wisata di desa dalam tahapan perencanaan hingga pengawasan (Susanawati *et al.*, 2019). Konsep *Community Based Tourism* (CBT) memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk ikut serta dalam pengelolaan desa wisata dan mendapatkan penghasilan dari kegiatan pariwisata yang ada. Kesempatan bagi masyarakat agar terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata milik mereka sehingga dapat berdaya dan memperoleh keuntungan pemasukan (Krisnani dan Darwis, 2015). Aspek-aspek pendukung dalam

pengembangan pariwisata yang berkelanjutan membutuhkan aspek-aspek pendukung berupa fisik, atraksi wisata, aksesibilitas, aktivitas dan fasilitas, dan sosial ekonomi dan budaya untuk mampu mencapai kesuksesannya (Ariyani *et al.*, 2020).

Desa wisata dikembangkan sesuai dengan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki. Pengembangan wisata pedesaan yang berbasis pengembangan potensi alam, pertanian, sosial dan budaya lokal dapat meningkatkan potensi masyarakat berbasis pariwisata, sejalan dengan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki (Komariah *et al.*, 2018). Desa wisata dapat diunggulkan keunikannya dari segi alam, budaya, dan manusianya, sehingga dapat menjawab wisatawan yang telah jenuh dengan bentuk pariwisata modern. Perkembangan pariwisata di daerah pedesaan dikarenakan terjadinya kejenuhan akan bentuk wisata modern sehingga ingin memiliki pengalaman berbaur dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat dan alam yang ada di pedesaan melalui pariwisata yang dikemas menjadi desa wisata (Andriyani *et al.*, 2017).

Desa wisata merupakan bentuk pariwisata alternatif yang mengedepankan kegiatan pariwisata untuk pelestarian sumberdaya yang dimiliki oleh desa. Pergeseran perkembangan pariwisata dari pariwisata massal (*mass tourism*) yang dianggap berfokus pada mencari profit bagi pengelola menjadi pariwisata alternatif (*alternative tourism*) yang dilandasi kepada pelestarian dan keberlanjutan alam serta pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat lokal melalui penggalian potensi sumber daya desa (Herdiana, 2019). Pengembangan desa wisata dipengaruhi oleh berbagai faktor keunikan yang dimiliki desa, keikutsertaan masyarakat, hingga

peran para *stakeholder*. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan desa wisata di antaranya adalah keunikan lokasi, keterlibatan pelaku wisata utama (masyarakat lokal), pembiayaan kegiatan pariwisata, peran memobilisasi partisipasi masyarakat, dan keterlibatan pemangku kepentingan (Wikantiyoso *et al.*, 2020).

Perubahan yang dialami untuk menjadi desa wisata dipicu oleh adanya keinginan untuk mempercepat perkembangan desa dan mensejahterakan masyarakat hingga memenuhi permintaan wisatawan. Transisi yang dialami oleh desa wisata dari awalnya desa non-wisata terjadi karena adanya pertimbangan sebagai upaya yang mendasari berupa (Herdiana, 2019):

1. Melestarikan budaya dan tradisi yang dimiliki desa;
2. Mengembangkan potensi pada sumber daya alam, budaya, dan manusia;
3. Menyediakan kesempatan bekerja bagi masyarakat lokal;
4. Menggiatkan percepatan pembangunan desa;
5. Meningkatnya permintaan masyarakat di luar desa untuk memperoleh pengalaman yang unik dari suatu desa wisata.

Berbagai pihak baik di dalam maupun luar lingkup desa wisata itu sendiri melakukan sinergisme atau bekerja sama dan menyelaraskan tujuan dalam pengembangan desa wisata. Proses berkembangnya desa wisata membutuhkan keterlibatan dan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah desa, masyarakat, hingga pihak swasta dan dalam hal ini seluruh pihak diwajibkan memiliki preferensi yang sama untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa dan segala implikasinya (Herdiana, 2019). Pengembangan pariwisata di desa juga

membutuhkan masyarakat yang memiliki karakter peduli wisata. Karakter peduli wisata dibutuhkan untuk mempercepat perkembangan yang diupayakan oleh pemerintah, tetapi selama ini peran masyarakat secara mandiri dengan inisiatif dan partisipasi masyarakat masih menjadi kendala dalam setiap pengembangan wisata (Resdiana dan Hasanah, 2020).

Masyarakat sebagai pihak yang dilibatkan dalam pembangunan desa wisata diharuskan memiliki keinginan dan kemampuan dalam mengembangkan dan membuka diri terhadap eksternal maupun wisatawan agar pengembangan desa wisata dapat didukung oleh kelembagaan masyarakat dan hasil dari pengembangan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam peningkatan kondisi ekonomi dan taraf hidup (Herdiana, 2019). Masyarakat yang ada di lingkungan desa wisata memiliki kewajiban untuk menjaga potensi dan mendukung pengembangan desa wisata, mereka pun memperoleh hak berupa mendapatkan perlakuan yang adil dan diikutsertakan dalam kegiatan pembangunan desa wisata. Masyarakat lokal di desa wisata berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan ciri khas dan potensi yang dimiliki desa serta memberikan dukungan terhadap program rancangan pemerintah, lalu hak yang akan diperoleh masyarakat berupa memperoleh keadilan dalam hal apapun, kesempatan untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas masyarakat, serta dilibatkan dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata (Haryanti dan Nugorho, 2018).

Desa wisata dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk menurut tujuan pengembangannya menjadi desa wisata adat, desa wisata alam, dan desa wisata

ekonomi kreatif. Tipologi yang dimiliki oleh desa wisata dibedakan menjadi tiga bentuk sesuai dengan potensi dan pola pengembangan pariwisata di dalamnya seperti berikut (Herdiana, 2019):

1. Desa wisata adat atau budaya yang berarti pengembangan serta pelestarian budaya seperti sistem kepercayaan (*religi*), kesenian, sosial, dan hal lainnya yang termasuk dalam budaya dan adat istiadat. Tujuan pengembangan adalah untuk melestarikan budaya dan adat istiadat di kalangan masyarakat desa.
2. Desa wisata alam atau konservasi alam yang berarti pengembangan sumber daya alam berupa air terjun, hutan, dan lainnya. Tujuannya untuk perlindungan alam dan lingkungan.
3. Desa wisata ekonomi kreatif yang berarti pengembangan potensi berbasis kreativitas masyarakat lokal dalam memproduksi produk-produk kreatif. Tujuan pengembangan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat.

Pengembangan desa wisata perlu memperhatikan model yang mengarah pada kerakyatan. Model pengembangan desa wisata dilakukan secara tepat apabila masyarakat diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan wisata melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di lokasi wisata dengan memperhatikan model kepariwisataan kerakyatan yang mencakup: (1) berskala kecil dengan memperhatikan kapasitas daya dukung; (2) peningkatan peranan masyarakat lokal selaku pemilik dan penyelenggara; (3) pemanfaatan potensi yang dimiliki (Mujanah *et al.*, 2016). Berkembangnya pariwisata di desa dapat membuahkan dampak positif bagi masyarakat desa itu sendiri mulai dari segi ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan.

Dampak yang dapat dirasakan bagi masyarakat dari kegiatan pengembangan pariwisata di desa berupa: peningkatan pendapatan terutama bagi masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, penyedia jasa pariwisata, dan lainnya; perbaikan tingkat pendidikan masyarakat seiring dengan perbaikan pendapatan; dan pemerataan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat karena kemudahan akses layanan kesehatan (Sukmawati, 2019).